

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

RENCANA KERJA

Tahun 2015



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Sekretariat Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dirancang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan dituangkan dalam buku ini. Buku ini berisikan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Tahun 2015, dan merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang penyusunannya mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019, dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Ditjen PHLHK.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2015 ini maka diharapkan tidak hanya memberikan arahan kepada seluruh jajaran Ditjen, akan tetapi juga dapat memberikan informasi kepada unit lainnya di lingkup KLHK, maupun di luar KLHK, mitra pembangunan dan masyarakat luas.

Jakarta, Juni 2015

Direktur Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.40/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015- 2019. Disebutkan bahwa Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Renstra Unit Kerja Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, serta Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Tahun 2019. Selanjutnya Renja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan pentingnya upaya strategis untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk penegakan hukum telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.2/PHLHKSETDIT/2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

Upaya tersebut dituangkan salah satunya sebagai Rencana Kerja Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK yang menjadi kesepakatan baik dalam sasaran kegiatan, pendanaan maupun ukuran keberhasilannya sehingga seluruh aktifitas dapat mendorong tercapainya target yang telah digariskan di dalam Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK Tahun 2015 dan selanjutnya memberikan dampak pada pencapaian sasaran yang tercantum pada Renstra Kementerian LHK Tahun 2015 -2019. Proses penyusunan Renja Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK ini dilakukan melalui rangkaian diskusi dan penelaahan hasil evaluasi dengan melibatkan seluruh Bagian di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK dengan pokok bahasan meliputi identifikasi permasalahan/kondisi pemungkin dalam pencapaian target yang telah digariskan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK, upaya- upaya yang akan dilakukan dan indikator keberhasilan.

KONDISI SAAT INI

Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019 disusun berdasarkan target capaian pembangunan yang ditetapkan dalam di dalam Renstra Direktorat Jenderal PHLHK Tahun 2015-2019 sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLH-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kinerja yang dicapai pada Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK, diharapkan dapat mencapai kinerja pada skala Direktorat Jenderal PHLHK. Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan, Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK memiliki satu kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PHLHK. Output/keluaran kegiatan tersebut adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PH LHK berjalan secara efektif dan efisien, baik di pusat maupun daerah (UPT dan Pemerintah Daerah). Dengan demikian Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK dimaksudkan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Ditjen PHLHK memiliki potensi dan juga menghadapi permasalahan, baik internal maupun eksternal, beberapa diantaranya telah diungkapkan dalam Sub Bab 1.1 tersebut di atas. Secara garis-besar, hasil identifikasi potensi dan permasalahan termaksud di atas adalah sebagai berikut:

A. Internal

a. Potensi:

- Kewenangan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan menjadi lebih luas, sebagai implikasi dari bergabungnya dua Kementerian menjadi Kementerian LHK, antara lain karena bertambahnya jumlah Undang Undang yang berkenaan dengan urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Peraturan perundang-undangan pada tingkatan normatif cukup sebagai landasan hukum.
- Jumlah sumber daya potensial juga bertambah signifikan, sebagai implikasi dari bergabungnya dua Kementerian menjadi Kementerian LHK.
- Sumberdaya aparatur pada tingkat manajemen sudah mendukung penerapan penegakan hukum.

b. Permasalahan:

- Kapasitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, terutama kapasitas sumberdaya manusia dan kapasitas teknologi pirantinya, relatif belum memadai untuk menghadapi/mengatasi tantangannya, mengingat pertumbuhan kapasitas lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan problematik yang mesti dihadapi/diatasnya, seperti misalnya pada kasus kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi tiap tahun, kasus ancaman terhadap kepunahan sejumlah spesies dan penurunan keanekaragaman hayati yang cenderung meningkat, dst. Kapasitas Ditjen PHLHK, terutama *leadership* dan manajemennya, masih harus diperkuat, agar mampu meyakinkan pentingnya penegakan hukum lingkungan hidup kepada instansi-instansi terkait. Kapasitas yang sekarang ini akan menjadi relatif kurang memadai jika dibandingkan dengan tantangan dan situasi yang tumbuh dan berkembang pada kurun waktu belakangan ini hingga tahun 2019. Sumberdaya aparatur pada tingkat operasional belum yang memadai relatif dibandingkan dengan tantangannya. Prasarana dan sarana belum memadai relatif dibandingkan dengan permasalahan teknis yang harus diatasi.
- Akses informasi bagi publik yang dinilai masih harus diperbaiki, antara lain agar publik dapat berperan serta, antara lain melalui mekanisme *whistle blower*, kontrol sosial, pengaduan, dan peranserta dalam mata rantai pengawasan dalam rangka penegakan hukum administrasi.
- Jumlah PPNS dan PPLH tidak cukup untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dalam melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum pidana, antara lain karena persoalan jabatan fungsional nya.
- Peraturan perundang-undangan pada tingkatan prosedur operasional belum lengkap dan atau perlu dimutakhirkan.

B. Eksternal

a. Potensi:

- Peran penegakan hukum merupakan bagian penting dari isu mengenai keadilan, dan isu ini diposisikan pada tiga isu strategis dari Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (RPJMN 2015-2019).
- Penegakan hukum lingkungan hidup diamanatkan secara eksplisit, kepada kementerian yang membidangi lingkungan hidup, oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

- Besarnya harapan publik atas tegaknya keadilan, demikian juga perhatian, dukungan, aspirasi, dan ekspektasi publik yang besar pada keberhasilan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan

b. **Permasalahan:**

- Regulasi yang diperlukan sebagai dasar hukum untuk efektifitas pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan masih cukup banyak yang harus ditetapkan, antara lain peraturan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, peraturan pelaksanaan mengenai keanekaragaman hayati, peraturan pelaksanaan mengenai perizinan lingkungan hidup, kepastian dan kejelasan hukum tentang batas-batas kawasan hutan dan lahan, dst.
- Pembagian tugas-tugas penegakan hukum antara “pusat dan daerah” perlu segera dimutakhirkan aturan penyelarasannya, untuk mencegah terjadinya saling lempar urusan dari daerah ke pusat dan atau sebaliknya, karena perubahan cara kerja dan koordinasi di tingkat Pusat dan tingkat Daerah, yang merupakan implikasi dari penggabungan dua kementerian menjadi Kementerian LHK.
- Kapasitas penegakan hukum di Kabupaten berada pada nilai indeks yang terendah, sedangkan di tingkat Nasional pada nilai indeks yang tertinggi. Kesejangan nilai indeks tersebut mengindikasikan bahwa diperlukan perubahan manajemen, baik oleh jajaran pemerintah di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, agar penegakan hukum menjadi lebih berhasil.
- Kemungkinan turunnya kepercayaan publik atas efektifitas penegakan hukum perlu diantisipasi.
- Meningkatnya kompleksitas dan moda baru perilaku kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Perubahan paradigma pemerintah yang ingin memberikan akses besar terhadap masyarakat menimbulkan banyaknya pendudukan hutan secara illegal.
- Besarnya harapan rakyat akan keadilan.
- Jumlah dan kompleksitas kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang cenderung meningkat.

BAB II

REALISASI KINERJA

A. Target Kinerja Tahun 2015

Entitas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai institusi baru, memiliki tantangan yang sangat berat dalam membangun dan menata organisasi guna mendukung tercapainya sasaran strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 ini, ditetapkan indikator kinerja program penegakan hukum dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PHLHK adalah SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai minimal 70 point. Instrumen untuk mengukur indikator kinerja program tersebut terdiri dari 10 instrumen sebagaimana dijelaskan pada table dibawah ini.

Pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan kegiatan teknis Ditjen PHLHK tahun 2015 ini dilaksanakan pada 52 (lima puluh dua) satuan kerja, yang meliputi penyediaan anggaran, sarana dan prasarana serta perangkat operasional lainnya seperti Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Guna terlaksananya tata kelola birokrasi penegakan hukum maka ditetapkan 10 indicator kinerja kegiatan.

FAKTOR – FAKTOR KEBERHASILAN DAN ATAU KENDALA/HAMBATAN

Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan kegiatan teknis Ditjen PHLHK lebih rendah dari target yang ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Waktu efektif menjalankan organisasi Ditjen PHLHK dimulai pada Bulan Juli 2015 atau sekitar 6 Bulan. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum harus menyiapkan perangkat organisasi sampai pada level operasional di lapangan.
2. Pelaksanaan waktu penilaian SAKIP yang dilakukan pada Bulan Juli dirasakan sangat tidak fair, dimana kegiatan dan organisasi baru berjalan menyiapkan perangkat-organisasi.
3. Komposisi dan struktur anggaran DIPA Ditjen PHLHK yang 20 % merupakan PNBP serta pengalokasian tambahan anggaran di Bulan Oktober 2015.

TABEL PERKIRAAN REALISASI TAHUN 2015

UNIT KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	UNIT INDIKATOR	ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN (IKE)	PERKIRAAN REALISASI TAHUN 2015
PROGRAM DAN EVALUASI	TERSELENGGARANYA PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, DATA DAN INFORMASI, EVALUASI DAN PELAPORAN DITJEN PHLHK	PROGRAM DAN EVALUASI	DOKUMEN PROGRAM DAN ANGGARAN	RENCANA STRATEGIS DITJEN PHLHK	1 DOKUMEN
				RENCANA KERJA DITJEN PHLHK TA 2016	1 DOKUMEN
				KELOMPOK KERJA PROGRAM DAN ANGGARAN BIDANG GAKKUM 2015	1 DOKUMEN
				PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG GAKKUM TA 2016	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				BIMTEK PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN GAKKUM TA 2015	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PENYUSUNAN RENCANA KERJA SETDITJEN GAKKUM TA 2016	1 DOKUMEN

					PEMANTAPAN PENYUSUNAN RKA KL BIDANG GAKKUM TA 2016	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				DOKUMEN EVALUASI DAN PELAPORAN	PEDOMAN PENYUSUNAN LAKIP DITJEN GAKKUM	1 DOKUMEN
					PENYUSUNAN LAKIP SETDITJEN GAKKUM TA 2015	1 DOKUMEN
					PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN, TRIWULAN, SEMESTER SETDITJEN GAKKUM	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				DOKUMEN DATA DAN INFORMASI	PENGUMPULAN BAHAN BUKU STATISTIK DITJEN GAKKUM 2015	1 DOKUMEN
					PENYEBARLUASAN INFORMASI BIDANG GAKKUM	1 DOKUMEN/ LAYANAN

HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK	TERSELENGGARANYA PERENCANAAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK DITJEN PHLHK	HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK	DOKUMEN KERJASAMA DAN KEMITRAAN	FASILITASI DAN KOORDINASI DENGAN K/L TERKAIT	1
				PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	1
			DOKUMEN RANCANGAN PERPU BID GAKKUM	DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG GAKKUM	1 DOKUMEN
				PENYUSUNAN SOP KOORDINASI	1 DOKUMEN
				REVISI PERMENHUT NO 75 TAHUN 2014 TENTANG POLISI KEHUTANAN	1
KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA	TERSELENGGARANYA PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN ORGANISAI TATA LAKSANA	KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA	DOKUMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KONSULTASI HUKUM DENGAN PENGACARA	1
				PENYUSUNAN DATA SIMPEG DAN SAPK	1

					PELANTIKAN/SERAH TERIMA JABATAN PEJABAT STRUKTURAL	1	DOKUMEN/LAYANAN
					FORMASI PEGAWAI PEMBERKASAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN (STRUKTURAN DAN REGULER) 2 Periode	1	DOKUMEN/LAYANAN
					PENYUSUNAN DUK PENATAAN PEJABAT STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL LINGKUP GAKKUM	1	DOKUMEN/LAYANAN
					PEMBINAAN PEGAWAI LINGKUP DITJEN GAKKUM	1	DOKUMEN/LAYANAN
					PEMBINAAN KELEMBAGAAN LINGKUP DITJEN GAKKUM	1	DOKUMEN/LAYANAN

KEUANGAN DAN UMUM	TERSELENGGARANYA PELAKSANAAN KEUANGAN DAN UMUM	KEUANGAN DAN UMUM	DOKUMEN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	PENYEMPURNAAN PROSEDUR KERJA	1 DOKUMEN/LAYANAN
				PENYEMPURNAAN DAN PEMANTAPAN ORGANISASI	1 DOKUMEN/LAYANAN
			DOKUMEN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DIJEN DAN SETDITJE GAKUM SEMESTER I TAHUN 2015	1 DOKUMEN/LAYANAN
				LAPORAN SAK UAKPA TRIUWLAN TAHUN III TAHUN 2015	1 DOKUMEN/LAYANAN
				SATUAN PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH	1 DOKUMEN/LAYANAN
			DOKUMEN KETATAUSAHAAN DAN UMUM	PENATAAN ARSIP DNA PENGHAPUSAN NON ARSIP LINGKUP SETDITJEN GAKKUM	1 DOKUMEN/LAYANAN
				PENGLOLAAN SURAT/DOKUMEN DINAS	1 DOKUMEN/LAYANAN

				DOKUMEN PERLENGKAPAN	EVALUASI KEBUTUHAN SARPRAS DITJEN GAKKUM	1 DOKUMEN/LAYANAN
					PEMUTAKHIRAN DATA BARANG MILIK NEGARA	1 DOKUMEN/LAYANAN

B. Target Tahun 2016

Tahun 2016 merupakan tahun kedua periode pembangunan lima tahunan 2015-2019, sehingga diharapkan dapat meletakkan kondisi pemungkin bagi akselerasi pencapaian target pembangunan tiga tahun berikutnya. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan dapat mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Perkembangan pencapaian pelaksanaan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 dimonitor dan dievaluasi setiap bulan selama tahun berjalan.

Perkiraan Capaian Indikator Kinerja Elemen Kegiatan (IKE) tahun 2016 sampai bulan Desember 2016 untuk mendukung Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

TABEL TARGET TAHUN 2016

UNIT KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	UNIT INDIKATOR	ELEMEN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN (IKE)	PERKIRAAN TARGET TAHUN 2016
PROGRAM DAN EVALUASI	TERSELENGGARANYA PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, DATA DAN INFORMASI, EVALUASI DAN LAPORAN DITJEN PHLHK	PROGRAM DAN ANGGARAN	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN	PENYUSUNAN RENCANA KERJA DITJEN PHLHK TA 2017	1 DOKUMEN
				PENYUSUNAN RENCANA KERJA SETDITJEN GAKUM TA 2016	1 DOKUMEN
				RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG PHLHK TA 2016	1 DOKUMEN
			PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN	PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PHLHK	1 DOKUMEN
				PENYUSUNAN STANDAR KEGIATAN DAB BIAYA BIDANG PHLHK TA 2017	1 DOKUMEN

				SOSIALISASI JUKNIS ANGGARAN DAN SKB BIDANG PHLHK TA 2017	1 DOKUMEN
				PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PHLHK	1 DOKUMEN
				PEMANTAPAN PENYUSUNAN RKA KL DITJEN PHLHK TA 2017	1 DOKUMEN
				KELOMPOK KERJA PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2016	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PROSES BISNIS PENGANGGARAN DITJEN PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				KELOMPOK KERJA PUG	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				MONITORING PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAN DIPA PROGRAM PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
		EVALUASI, PELAPORAN, DATA DAN INFORMASI	PENYUSUNAN EVALUASI DAN PELAPORAN	PENYUSUNAN DAN EVALUASI LAKIP PHLHK TA 2015	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				RAKOR EVALUASI KINERJA DITJEN PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN

					<p>PEMANTAPAN EVALUASI DAN PELAPORAN (PEP) PELAKSANAAN KEGIATAN GAKKUM LHK</p>	<p>1 DOKUMEN/ LAYANAN</p>
					<p>PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN DITJEN GAKKUM LHK TAHUN 2015</p>	<p>1 DOKUMEN/ LAYANAN</p>
					<p>PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN, TRIWULAN, SEMESTERAN DAN TAHUNAN PHLHK</p>	<p>1 DOKUMEN/ LAYANAN</p>
					<p>PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN SETDITJEN PHLHK TAHUN 2016</p>	<p>1 DOKUMEN/ LAYANAN</p>
				<p>DOKUMEN DATA DAN INFORMASI</p>	<p>PENYUSUNAN BUKU STATISTIK DITJEN GAKUM 2015</p>	<p>1 DOKUMEN</p>
					<p>PENYAJIAN INFORMASI PEMBANGUNAN KEHUTANAN BIDANG GAKKUM LHK</p>	<p>1 DOKUMEN/ LAYANAN</p>
					<p>PENYEBARLUASAN INFORMASI BIDANG PHLHK</p>	<p>1 DOKUMEN/ LAYANAN</p>

					PAMERAN PENEGAKAN HUKUM LHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
					PENGLOLAAN OPERASIONAL ROOM DATA MANAJEMEN SYSTEM PENEGAKAN HUKUM	1 DOKUMEN/ LAYANAN
					MAINTENANCE APLIKASI DAN PUBLIKASI PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIS	TERSELENGGARANYA PERENCANAAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIS DITJEN PHLHK	KERJASAMA TEKNIS	PENYUSUNAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA DALAM NEGERI	PENYUSUNAN KURIKULUM TERKAIT HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	LAUNCHING LOKAKARYA DAN PELATIHAN NASIONAL PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	1 DOKUMEN/ LAYANAN
					PENYUSUNAN KERJASAMA LUAR NEGERI	1 DOKUMEN

		HUKUM	PENYUSUNAN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1 DOKUMEN
				SOSIALISASI TENTANG PERATURAN BIDANG PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PENDAMPINGAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN KASUS LHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	TERSELENGGARANYA PERENCANAAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	KEPEGAWAIAN	DOKUMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN TRIWULAN BIDANG KEPEGAWAIAN	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DITJEN PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PENGEMBANGAN DAN EDITING SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PEMBERKASAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL	1 DOKUMEN/ LAYANAN

					PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
					TATA NASKA DINAS KEPEGAWAIAN	1 DOKUMEN/ LAYANAN
					PENYUSUNAN ANALISIS DAN EVALUASI JABATAN UPT PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
		ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	DOKUMEN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA		PEMBINAAN KELEMBAGAAN LINGKUP DITJEN PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
					PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LH	1 DOKUMEN/ LAYANAN
					EVALUASI PELAKSANAAN PENILAIAN SASARAN KINERJA PEGAWAI	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PENYELENGGARAAN PEMBINAAN STAF DAN PUBLIK TERKAIT	PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA DITJEN PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN

KEUANGAN DAN UMUM	TERSELENGGARANYA PERENCANAAN KEUANGAN DAN UMUM	ADMINISTRASI KEUANGAN	DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN	REKONSILIASI DAN KONSOLIDASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BIDANG PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				KOORDINASI DAN PEMBINAAN KEUANGAN BAGIAN PELAKSANA ANGGARAN SATKER	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PENYEGARAN BENDAHAARA PENGELUARAN DITJEN PHLHK TA 2016	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PEMBAHASAN KEGIATAN BP/BPP SATKER SETDITJEN PHLHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
		UMUM	DOKUMEN KETATAUSAHAAN DAN UMUM	PENATAAN ARSIP DAN PENGHAPUSAN NON ARSIP LINGKUP SETDITJEN GAKKUM	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PENGLOLAAN SURAT/DOKUMEN DINAS	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				LAYANAN RUMAH TANGGA PIMPINAN	1 DOKUMEN/ LAYANAN

				SOSIALISASI TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN LHK	1 DOKUMEN/ LAYANAN
			DOKUMEN PERLENGKAPAN	EVALUASI KEBUTUHAN SARPPRAS DITJEN GAKKUM	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PEMUTAKHIRAN DATA BARANG MILIK NEGARA	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				BIMTEK DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN BMN	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				SOSIALISASI PERATURAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN TERBARU TERKAIT PENGELOLAAN BMN	1 DOKUMEN/ LAYANAN
				PENYUSUNAN LAPORAN BMN DITJEN GAKKUM SEMESTER I 2016	1 DOKUMEN/ LAYANAN

BAB III KERANGKA PENDANAAN

Skenario pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Kegiatan, Program, dan Sasaran Strategis tahun 2015, diuraikan pada Tabel 3.1. Skenario pendanaan tersebut telah mempertimbangkan segala kegiatan yang dibutuhkan dalam pengembangan baik infrastruktur, sumber daya manusia, maupun hasil evaluasi dari kinerja periode sebelumnya. Pendanaan ini tidak hanya dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi juga dapat diperoleh dari kerjasama baik dari dalam negeri maupun luar negeri selama tidak merugikan pemerintah.

Kebutuhan pendanaan tersebut di susun secara terperinci setiap tahunnya berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan. Kebutuhan dana tahunan tersebut dapat dimanfaatkan langsung oleh unit kerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun melalui delegasi terhadap badan tertentu demi mendukung tercapainya sasaran dan kinerja direktorat ini.

KERANGKA PENDANAAN KEGIATAN (Rp '000)		
		TA 2015
Kegiatan		
Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		22.860.000
Unit Kegiatan		
Program dan Evaluasi		5,715,000
Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana		5,715,000
Keuangan dan Umum		5,715,000
Hukum dan Kerjasama Teknik		5,715,000

**Tabel Matrik Target dan Rencana Alokasi Pendanaan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

Tabel Matrik Target dan Rencana Alokasi Pendanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kegiatan/Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)						
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
K5: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan								22,860,000	65,032,518	67,633,393	70,343,552	73,167,835		
			UK1: Program dan Evaluasi							5,715,000	3,026,110	3,202,138	3,388,456	3,585,666
						<u>S1.P7.K5.UK1.1:</u> Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi LHK	<u>S1.P7.K5.UK1.1.U11:</u> Jumlah capaian sasaran indikator program dan indikator kegiatan	95%	95%	95%	95%	95%		
		<u>S1.P7.K5.UK1.1.U12:</u> Nilai SAKIP Dirjen PHLHK	70	72	74	76	78							
		<u>S1.P7.K5.UK1.1.U13:</u> Jumlah satker yang terselenggara program dan kegiatan	52	78	10	10	10							
	<u>S1.P7.K5.UK1.2:</u> Meningkatnya cakupan dan													

Kegiatan/Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	penetrasi komunikasi dan kampanye Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<p><u>S1.P7.K5.UK1.2.U11:</u> Jumlah berita media mengenai Kegiatan Penegakan Hukum LHK kepada masyarakat</p> <p><u>S1.P7.K5.UK1.2.U12:</u> Jumlah kampanye/pameran PPLHK melalui media cetak, elektronik, tradisional dan sosial</p>	60	80	100	110	120					
	<p><u>S1.P7.K5.UK1.3:</u> Tercapainya data dan Informasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>	<p><u>S1.P7.K5.UK1.3.U11:</u> Jumlah satker yang memiliki sistem</p>	1	1	10	10	10					

Kegiatan/Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)							
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		informasi berfungsi memenuhi standar minimal setiap tahun													
		<u>S1.P7.K5.UK1.3.U12:</u> Jumlah Publikasi penegakan Hukum LHK	80	85	90	95	100								
		<u>S1.P7.K5.UK1.3.U13:</u> Tersedianya bahan kerja pimpinan PHLHK	12	12	12	12	12								
UK2: Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana								5,715,000	2,900,610	3,071,744	3,252,977	3,444,903			
	<u>S1.P7.K5.UK2.1:</u> Meningkatnya daya saing SDM Dirjen Penegakan Hukum lingkungan hidup dan kehutanan														
		<u>S1.P7.K5.UK2.1.U11:</u> Tersedianya Polisi Hutan, PPNS, PPLH dalam mendukung	3175	3225	3275	3325	3375								

Kegiatan/Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)							
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		PHLHK dan SDM PHLHK kompeten													
		S1.P7.K5.UK2.1.U12: Jumlah PPLH memenuhi kebutuhan untuk pengawasan	138	188	238	288	338								
		S1.P7.K5.UK2.1.U13: Jumlah PPNS memenuhi kebutuhan untuk penyidikan dalam rangka penegakan hukum	154	204	254	304	354								
	S1.P7.K5.UK2.2: Tersusunnya Struktur Organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif dan efisien	S1.P7.K5.UK2.1.U14: Jumlah SDM PHLHK yang meningkatkan kompetensinya	208	238	268	298	328								
		S1.P7.K5.UK2.2.U11: Jumlah UPT penegakan hukum yang efektif dan efisien	51	77	5	5	5								

Kegiatan/Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)										
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
UK3: Keuangan dan Umum	S1.P7.K5.UK3.1: Meningkatnya administrasi keuangan Ditjen PHLHK secara efektif	S1.P7.K5.UK3.1.U11: Opini WTP untuk laporan keuangan																
	S1.P7.K5.UK3.2: Terselenggaranya pengelolaan ketatausahaan, kerumahahtangaan dan pengelolaan perlengkapan KLHK		S1.P7.K5.UK3.2.U11: Jumlah Manajemen Aset															
			S1.P7.K5.UK3.2.U12: Jumlah sarana dan peralatan LHK terdistribusi di satker															

Kegiatan/Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan dan berfungsi baik sesuai dengan NSPK	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)												
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019								
UK4: Hukum dan Kerja Sama Teknik																				
	Tersedianya rancangan aturan dan NSPK terkait dijen PHLHK		<u>S1.P7.K5.UK4.1.U11:</u> Jumlah rancangan Kebijakan strategis	2	2	2	2	2												
				<u>S1.P7.K5.UK4.2:</u> Tersedianya bantuan hukum Dijen PHLHK		<u>S1.P7.K5.UK4.1.U12:</u> Jumlah NSPK	5	5	5	5	5									
							<u>S1.P7.K5.UK4.3:</u> Terselenggarakannya kerjasama teknis dalam meningkatkan		<u>S1.P7.K5.UK4.2.U11:</u> Jumlah bantuan hukum dijen PHLHK	5	5	7	8	10						

Kegiatan/Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target					Rencana Alokasi (Rp '000)							
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
PHLHK	efektifitas kegiatan	S1.P7.K5.UK4.3.U11: Jumlah kerjasama teknis dalam negeri terkelola	1	2	3	3	4								
			S1.P7.K5.UK4.3.U12: Jumlah kerjasama teknis luar negeri terkelola	2	3	4	5	5							

LAMPIRAN A: SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya (K5)	Program dan Evaluasi (UK1)	
		Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S1.P7.K5)
	Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi LHK (S1.P7.K5.UK1.1)	Jumlah capaian sasaran indikator program dan indikator kegiatan (S1.P7.K5.UK1.1.U11)
		Nilai SAKIP Dirjen PHLHK (S1.P7.K5.UK1.1.U12)
		Jumlah satker yang terselenggara program dan kegiatan (S1.P7.K5.UK1.1.U13)
	Meningkatnya cakupan dan penetrasi komunikasi dan kampanye Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S1.P7.K5.UK1.2)	Jumlah berita media mengenai Kegiatan Penegakan Hukum LHK kepada masyarakat (S1.P7.K5.UK1.2.U11)
		Jumlah kampanye/pameran PPLHK melalui media cetak, elektronik, tradisional dan sosial (S1.P7.K5.UK1.2.U12)
	Tercapainya data dan Informasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S1.P7.K5.UK1.3)	Jumlah satker yang memiliki sistem informasi berfungsi memenuhi standar minimal setiap tahun (S1.P7.K5.UK1.3.U11)
		Jumlah Publikasi penegakan Hukum LHK (S1.P7.K5.UK1.3.U12)
		Tersedianya bahan kerja pimpinan PHLHK (S1.P7.K5.UK1.3.U13)
	Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana (UK2)	
	Meningkatnya daya saing SDM Dirjen Penegakan Hukum lingkungan hidup dan kehutanan (S1.P7.K5.UK2.1)	Tersedianya Polisi Hutan, PPNS, PPLH dalam mendukung PHLHK dan SDM PHLHK kompeten (S1.P7.K5.UK2.1.U11)
		Jumlah PPLH memenuhi kebutuhan untuk pengawasan (S1.P7.K5.UK2.1.U12)

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN
		Jumlah PNS memenuhi kebutuhan untuk penyidikan dalam rangka penegakan hukum (S1.P7.K5.UK2.1.UI3)
		Jumlah SDM PHLHK yang meningkat kompetensinya (S1.P7.K5.UK2.1.UI4)
	Tersusunnya Struktur Organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif dan efisien (S1.P7.K5.UK2.2)	Jumlah UPT penegakan hukum yang efektif dan efisien (S1.P7.K5.UK2.2.UI1)
	Keuangan dan Umum (UK3)	
	Meningkatnya administrasi keuangan Ditjen PHLHK secara efektif (S1.P7.K5.UK3.1)	Opini WTP untuk laporan keuangan (S1.P7.K5.UK3.1.UI1)
	Terselenggaranya pengelolaan ketatausahaan, kerumahaan dan pengelolaan perlengkapan KLHK (S1.P7.K5.UK3.2)	Jumlah Manajemen Aset (S1.P7.K5.UK3.2.UI1)
		Jumlah sarana dan peralatan LHK terdistribusi di satker dan berfungsi baik sesuai dengan NSPK (S1.P7.K5.UK3.2.UI2)
	Hukum dan Kerja Sama Teknik (UK4)	
	Tersedianya rancangan aturan dan NSPK terkait ditjen PHLHK (S1.P7.K5.UK4.1)	Jumlah rancangan Kebijakan strategis (S1.P7.K5.UK4.1.UI1)
		Jumlah NSPK (S1.P7.K5.UK4.1.UI2)
	Tersedianya bantuan hukum Ditjen PHLHK (S1.P7.K5.UK4.2)	Jumlah bantuan hukum ditjen PHLHK (S1.P7.K5.UK4.2.UI1)
		Jumlah kerjasama teknis dalam negeri terkelola (S1.P7.K5.UK4.3.UI1)
	Terselenggarakannya kerjasama teknis dalam meningkatkan efektifitas kegiatan PHLHK (S1.P7.K5.UK4.3)	Jumlah kerjasama teknis luar negeri terkelola (S1.P7.K5.UK4.3.UI2)
		Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi ancaman dan gangguan keamanan hutan (S3.P7.K4.UK4.5.UI3)

GEDUNG MANGGALA WANABAKTI, BLOK IV LANTAI 4
JALAN GATOT SUBROTO, SENAYAN, JAKARTA PUSAT